

**"Pemda jangan
cuma andalkan duit
pusat"**

Jalankan Vaksinasi, Sri Mulyani Minta Pemda Tidak
Cuma Andalkan Duit dari Pusat



Sri Mulyani

Menteri Keuangan

Sumber gambar dan perita: <https://ekbis.sindonews.com/read/306510/33/jalankan-vaksinasi-sri-mulyani-minta-pemda-tidak-cuma-andalkan-duit-dari-pusat-1611039699>



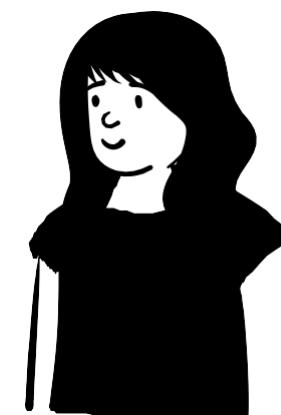
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Sayembara Bedah Data APBD Sinergi APBD Antarprovinsi: Vaksin untuk Indonesia

Road to Final

25 Mei 2021

Fransiska Citra Mariana
Process Engineer



Fajar Seno Adi
Senior Auditor



Kartika Rizqi Nastiti
Software QA Engineer



Zoraidha Aulia
Marketing Data Analyst



Latar Belakang

1 Dalam menangani covid pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk vaksin nasional

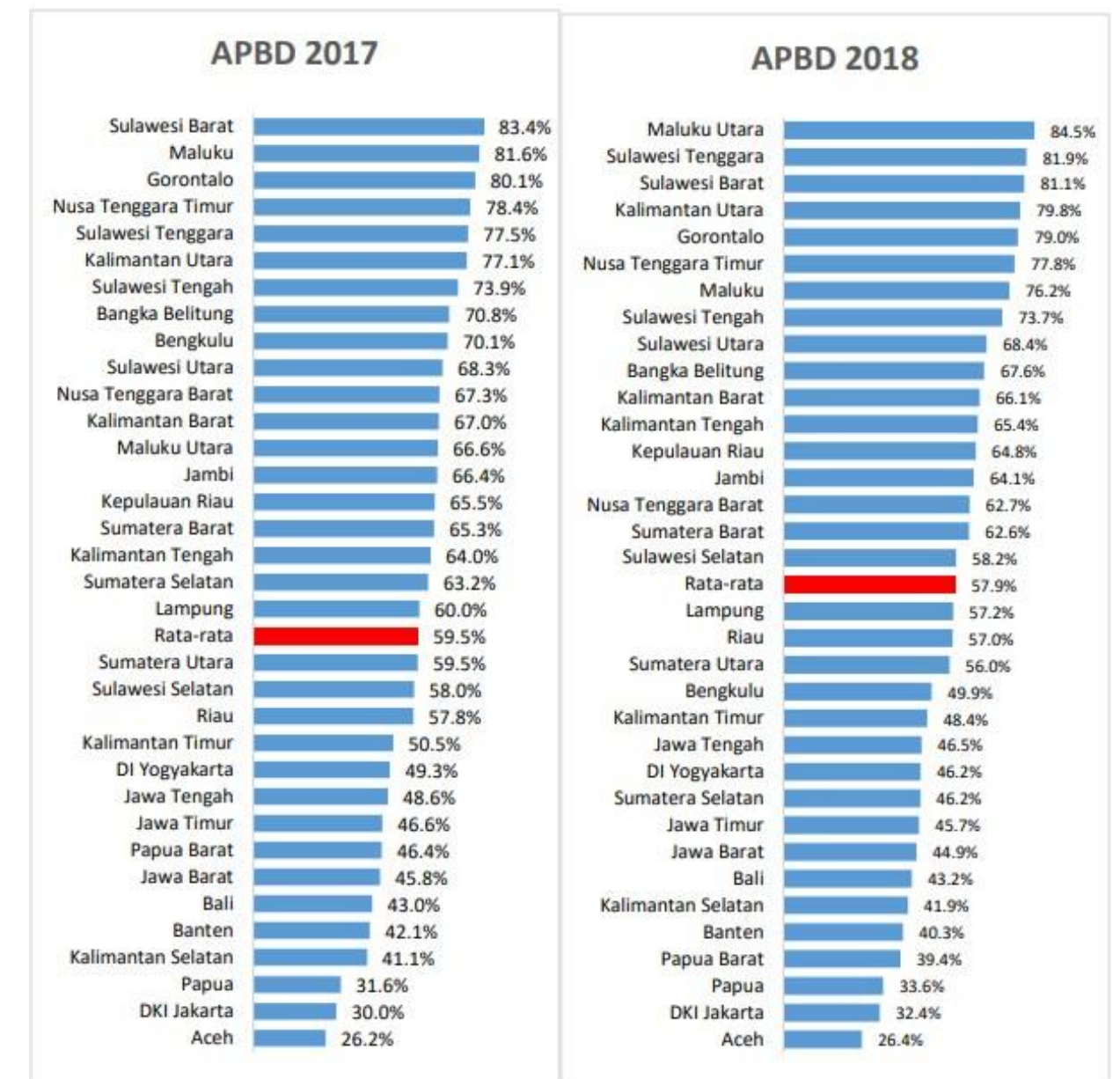
2 Dukungan pendanaan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebesar persentase tertentu dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai kebutuhan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jangkauan wilayah distribusi vaksin

Sumber: Poin-poin KMK yang mengatur mengenai earmarking DAU atau DBH untuk dukungan program pelaksanaan vaksinasi Covid-19

3 DAU/DAK merupakan komponen terbesar dana perimbangan. Provinsi-provinsi Indonesia Timur Punya ketergantungan tinggi pada DAU/DAK

Sumber: Ringkasan APBD TA-2018

Rasio Dana Perimbangan Terhadap Total Pendapatan antar Provinsi



Sumber: Ringkasan APBD TA-2018

Tujuan dan Manfaat

- 1 Panduan pemerintah daerah dalam mengalokasikan DAU yang tersedia untuk pengadaan vaksin minimal untuk provinsi masing-masing agar suatu daerah mencapai herd immunity
- 2 Strategi untuk daerah-daerah dengan ketergantungan lebih tinggi ke dana transfer dari pusat.
 - Apakah dengan pemotongan lebih besar?
 - Apakah dengan subsidi dari daerah yang punya independensi lebih tinggi?

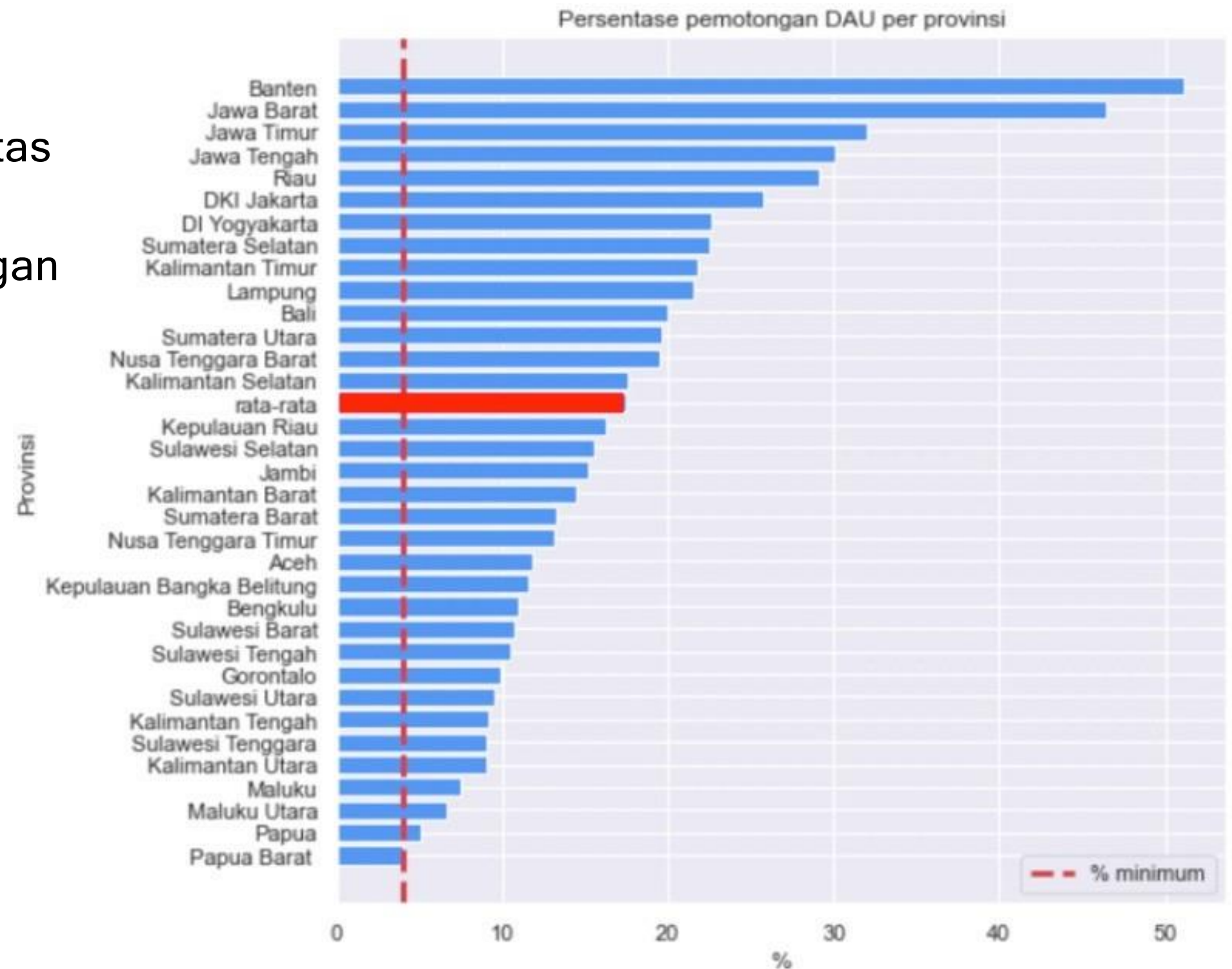
Analisis Data

- 1 Menentukan daerah-daerah dengan kecenderungan independensi tinggi terhadap dana dari pusat
- 2 Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk biaya vaksin tiap daerah
 - Kekebalan kelompok 70% populasi
 - Data penduduk 2021 berdasarkan hasil sensus BPS 2019
 - Vaksin Sinovac dua dosis
- 3 Menentukan persen earmarking DAU atau DBH berdasarkan DAU tahun 2021 untuk tiap provinsi di Indonesia

Hasil

1 Provinsi-provinsi dengan ketergantungan di atas rata-rata pada dana pusat di TA 2020 (data paling akhir di situs web DJPK) akan mirip dengan realisasi APBD TA 2018

2 Tanpa memperhitungkan biaya distribusi, penyimpanan, dan tenaga kesehatan, hanya Papua Barat saja yang bisa meng-cover penduduknya dengan pemotongan mendekati minimum (4%)



Hasil (2)

- 3 Daerah-daerah yang lebih "independen" perlu pemotongan anggaran lebih besar
 - %DAU lebih kecil
 - Jumlah penduduk lebih banyak
- 4 Perlu dibuka "sekat" antar provinsi supaya tiap provinsi dapat saling subsidi silang.
- 5 Adanya PMK No. 35/2020 tentang kriteria penyusunan APBD sudah tepat
 - Perlu ada rasionalisasi belanja barang dan jasa
 - Perlu adanya pengalihan dana untuk penanganan Covid-19 di daerah masing-masing



Simpulan

- 1 Hanya provinsi Papua Barat saja yang dapat dipotong mendekati batas minimum 4%. Perlu dibuka "sekat" antar provinsi supaya tiap provinsi dapat saling subsidi silang.
- 2 Perlu dilihat lebih jauh independensi provinsi terhadap pusat pasca banyaknya insentif pajak (pendapatan asli daerah menjadi berkurang)
- 3 Sejalan dengan PMK No. 35/2020, perlu adanya rasionalisasi belanja daerah guna membantu pemerintah pusat menciptakan kekebalan kelompok bagi satu Indonesia

**"APBD
jangan
diecer-ecer"**

**Jokowi ke Bupati: Anggaran Negara Sedang
Guncang, APBD Jangan Diecer-ecer!**

Jokowi mendesak para bupati untuk membuat skala prioritas
dalam menyusun APBD



Presiden Joko Widodo dalam Ratas Laporan Komite Penanganan Covid/19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka,

Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

Sumber gambar dan perita: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210326/9/1372879/jokowi-ke-bupati-anggaran-negara-sedang-guncang-apbd-jangan-diecer-ecer>